



Kerangka Dasar Penyelenggaraan SPIP

Paradigma, Proses Bisnis, Implementasi

Dwi Kiswanto, PhD
Pusat Strategi Kebijakan Pengawasan BPKP



“Apa harapan anda
dalam mengikuti Diklat
Penyelenggaraan SPIP?”



Tujuan Pembelajaran



1. Peserta **memahami mandat dan konsep** penyelenggaraan SPIP pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah.
2. Peserta **memahami proses bisnis** penyelenggaraan SPIP pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah.
3. Peserta **memahami pembinaan penyelenggaraan SPIP** pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah.
4. Peserta **melaksanakan** penyelenggaraan SPIP secara **disiplin, konsisten, menyeluruh, berkelanjutan, dan berdampak** pada masing-masing Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah.

“Apa yang anda pahami
tentang Pengendalian
Intern?”

“Bagaimana persepsi anda
terhadap penerapan
pengendalian intern di
instansi anda?”





1. Mandat dan Konsepsi SPIP

2. Proses Bisnis Penyelenggaraan SPIP

3. Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

Mandat dan Konsepsi SPIP

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa:

"Dalam rangka meningkatkan **kinerja, transparansi, dan akuntabilitas** pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan **sistem pengendalian intern** di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh."

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2004
TENTANG
PERBENDAHARAAN NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara;
- b. bahwa pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- c. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara diperlukan kaidah-kaidah hukum administrasi keuangan negara yang mengatur perbendaharaan negara;

Substansi pasal 58 dapat diterjemahkan bahwa,

- Pengelolaan keuangan negara dalam pembangunan nasional harus dikendalikan dengan baik.
- Presiden memiliki kewenangan pengendalian secara menyeluruh.
- Setiap level eksekutif, baik di pusat maupun daerah, bertanggung jawab dalam pengendalian urusan pemerintahan, keuangan, dan pembangunan.
- Menteri, Pimpinan Lembaga, dan Pimpinan Daerah wajib mengoordinasikan penyelenggaraan sistem pengendalian intern di organisasinya.

Mandat dan Konsepsi SPIP

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

“Sistem pengendalian intern merupakan proses yang **integral** pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh **pimpinan dan seluruh pegawai**. Proses tersebut bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas **tercapainya tujuan organisasi** melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 60 TAHUN 2008
TENTANG
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

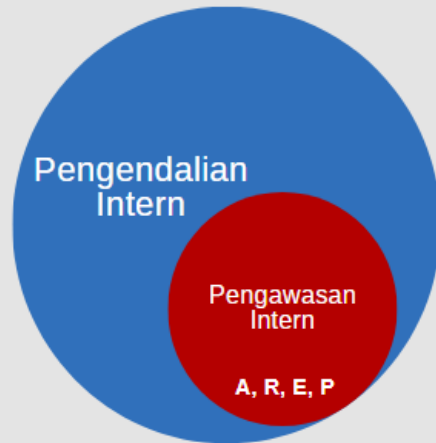
1. **Integral** – Pengendalian intern melekat pada seluruh lini proses bisnis organisasi dan dilakukan secara berkesinambungan, bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi kebutuhan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel.
2. **Pimpinan dan Seluruh Pegawai** – Pengendalian intern adalah tanggung jawab kolektif seluruh jajaran organisasi, bukan hanya pimpinan, pejabat struktural, atau APIP.
3. **Ketercapaian Tujuan Organisasi** – Pengendalian intern yang efektif mendukung pencapaian kinerja organisasi yang efisien, pelaporan keuangan andal, pengelolaan aset akuntabel, kepatuhan terhadap regulasi, serta mencegah pelanggaran hukum dan penyalahgunaan wewenang.

Mandat dan Konsepsi SPIP

Pengendalian Intern VS Pengawasan Intern

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang memiliki tugas melaksanakan **pengawasan intern** di lingkungan pemerintahan. - **PP No. 60 Tahun 2008**-

APIP berperan memastikan tercapainya tata kelola yang baik, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta kepatuhan terhadap peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan.



APIP melaksanakan berbagai aktivitas pengawasan intern, seperti **Audit, Reviu, Evaluasi, dan Pemantauan**, untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Pengawasan intern bukanlah keseluruhan dari pengendalian intern, melainkan hanya salah satu elemen di dalamnya.

Pengendalian intern mencakup sistem yang lebih luas untuk memastikan organisasi berjalan sesuai tujuan, sementara pengawasan intern berfungsi sebagai alat pemantauan dalam sistem tersebut.

- Setelah melaksanakan tugas pengawasan, **APIP wajib membuat laporan hasil pengawasan** dan menyampaikannya kepada pimpinan Instansi Pemerintah yang diawasi.
- Secara berkala, berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud, Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern **menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada menteri/pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota** sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya dengan tembusan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
- Secara berkala, berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dan laporan kegiatan pengawasan kebhendaharaan umum negara, **BPKP menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Presiden dengan tembusan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.**

Mandat dan Konsepsi SPIP

Berdasarkan **pasal 59** pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, BPKP telah secara progresif dan intensif melakukan aktivitas-aktivitas **pembinaan penyelenggaraan SPIP** yang meliputi:

1. Menyusun **pedoman teknis** penyelenggaraan SPIP
2. Men**sosialisasikan** dan mend**iseminasikan** SPIP
3. Melaksanakan kegiatan **pendidikan** dan **pelatihan** terkait SPIP
4. Melakukan **pembimbingan** dan **konsultasi** SPIP terhadap seluruh K/L/D
5. Meningkatkan **kompetensi** auditor pada APIP K/L/D

Seluruh langkah pembinaan SPIP dilakukan untuk:

- ✓ Memastikan SPIP di instansi pemerintah pusat & daerah berjalan efektif
- ✓ Mengawal ketercapaian tujuan organisasi
- ✓ Mendorong akuntabilitas & keberhasilan pembangunan nasional secara kolektif



1. Mandat dan Konsepsi SPIP

2. Proses Bisnis Penyelenggaraan SPIP

3. Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

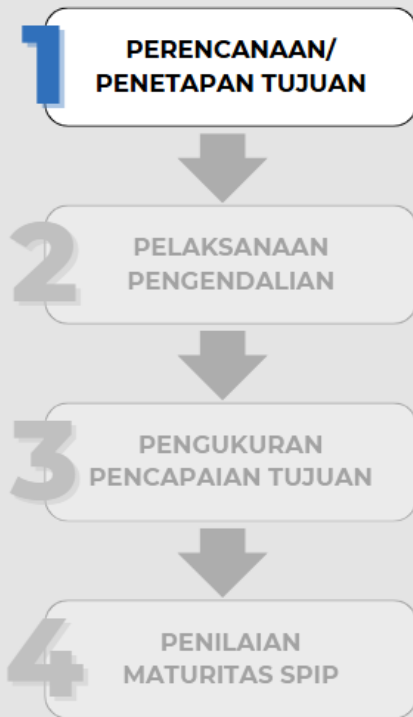
Proses Bisnis Penyelenggaraan SPIP

Secara umum, **proses bisnis** dari **penyelenggaraan SPIP** meliputi empat aspek utama yaitu:

1. perencanaan atau penetapan tujuan,
2. pelaksanaan pengendalian,
3. pengukuran pencapaian tujuan, serta
4. penilaian maturitas SPIP.



Proses Bisnis Penyelenggaraan SPIP



Perencanaan sebagai Tahapan Awal

- Memanfaatkan sumber daya secara optimal untuk mendukung tujuan organisasi
- Perencanaan organisasi berkontribusi pada pembangunan nasional
- Sinkronisasi perencanaan memastikan keterpaduan
- Perencanaan sebagai konteks pengendalian

Prinsip Perencanaan dalam SPIP

1. Menetapkan sasaran strategis yang selaras dengan visi & misi organisasi.

✓ Harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, & berbatas waktu (SMART)

2. Strategi pencapaian sasaran melalui program & kegiatan operasional.

✓ Indikator & target harus diformulasikan secara SMART

✓ Indikator & Target (SMART):

- **Specific:** mendefinisikan dengan tepat apa yang dituju
- **Measurable:** terukur atau ada angka yang bisa diukur
- **Achievable:** sesuatu hal yang dapat dicapai
- **Relevant:** mendukung pencapaian visi misi
- **Time-Bound:** dapat diselesaikan tepat waktu dan dalam kurun waktu yang wajar

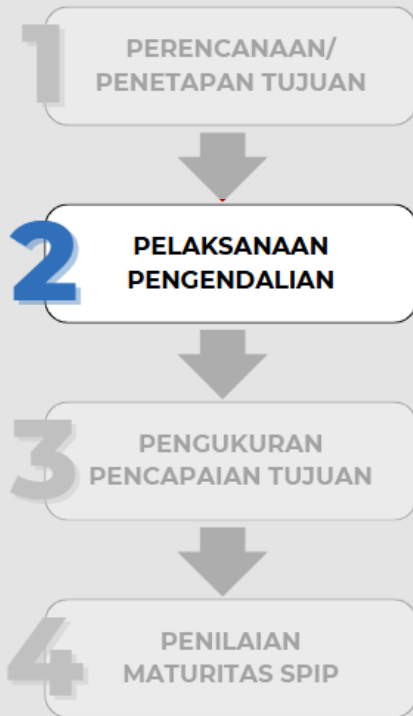
“Bagaimana organisasi anda melakukan praktik perencanaan?”



Proses Bisnis Penyelenggaraan SPIP

Organisasi harus **membangun struktur pengendalian** dan **melaksanakan proses pengendalian** untuk

- Memastikan tugas pokok & fungsi berjalan efektif
- Mengawal pencapaian tujuan & target yang telah ditetapkan



Esensi Pelaksanaan Pengendalian

- ✓ Pengendalian tidak cukup hanya dibangun, tetapi harus dijalankan dengan disiplin dalam setiap proses.
- ✓ Pengendalian harus menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, bukan sekedar dokumen atau kebijakan
- ✓ Pengendalian adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas unit tertentu, sehingga memerlukan koordinasi dan partisipasi aktif semua pihak.

Sinergi antar K/L/D sangat penting dalam memastikan **efektivitas pengendalian** dan pencapaian tujuan pembangunan nasional.:

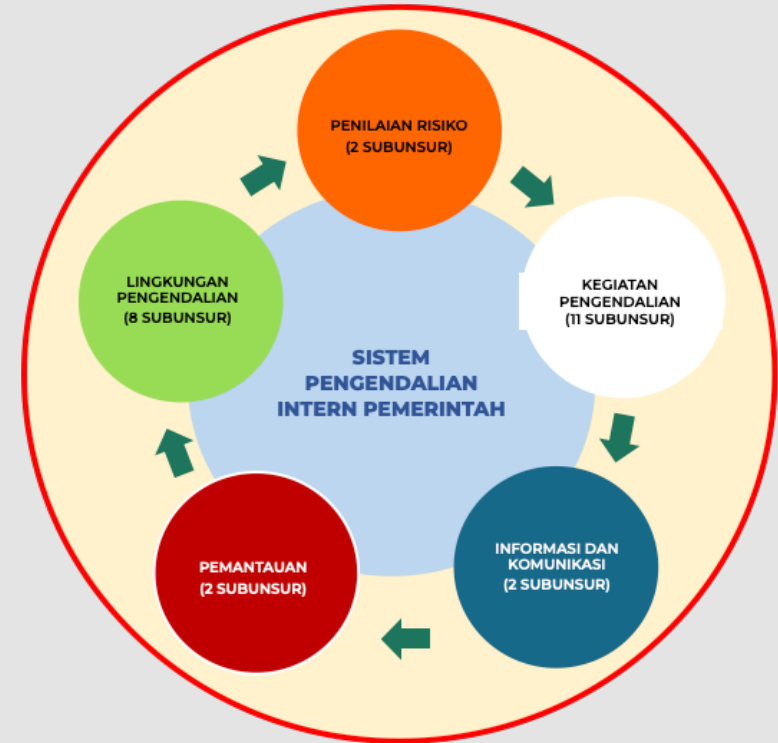
- Pengendalian yang dilakukan oleh K/L/D berdampak pada **efektivitas keseluruhan program lintas sektoral**.
- Tanggung jawab pengendalian sesuai dengan Perpres No. 39 Tahun 2023 tentang **Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN)**.
- Setiap risiko pembangunan lintas sektoral dikendalikan oleh **masing-masing K/L/D sesuai kewenangannya**.
- **Evaluasi program lintas sektoral** dilakukan secara kolektif berdasarkan pengendalian dari semua entitas yang terlibat.

Proses Bisnis Penyelenggaraan SPIP

“Penyelenggaraan SPIP secara sederhana adalah penerapan berbagai **unsur pengendalian** yang dilaksanakan secara **menyatu, terpadu**, serta **terintegrasi** dalam berbagai aktivitas instansi pemerintah.

Unsur-unsur pengendalian tersebut secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut:

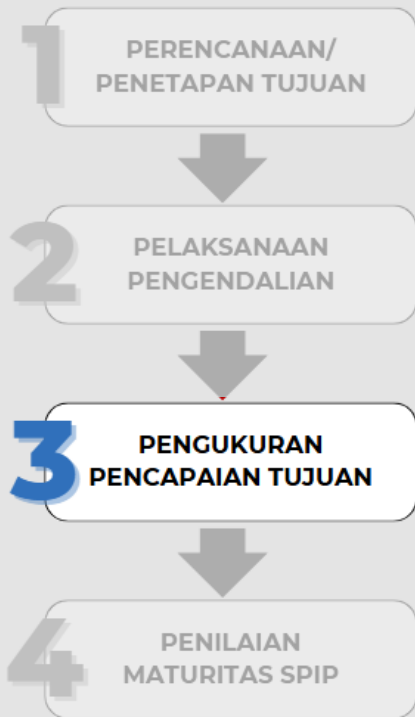
- 1.membangun **lingkungan yang kondusif** untuk pengendalian yang efektif;
- 2.mengelola **risiko** yang berpotensi menghambat atau mendukung kinerja organisasi
- 3.melaksanakan berbagai **aktivitas pengendalian** dalam rangka mitigasi risiko
- 4.mengkomunikasikan **informasi** dalam rangka pengendalian; serta
- 5.melaksanakan **evaluasi dan monitoring** atas efektivitas pengendalian



“Bagaimana aktivitas
pengendalian eksisting di
organisasi anda?”



Proses Bisnis Penyelenggaraan SPIP



Pengukuran dilakukan untuk memastikan **kontribusi pengendalian intern** terhadap **pencapaian tujuan** organisasi:

1. Kegiatan organisasi yang efektif & efisien
2. Keandalan pelaporan keuangan
3. Pengamanan aset
4. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

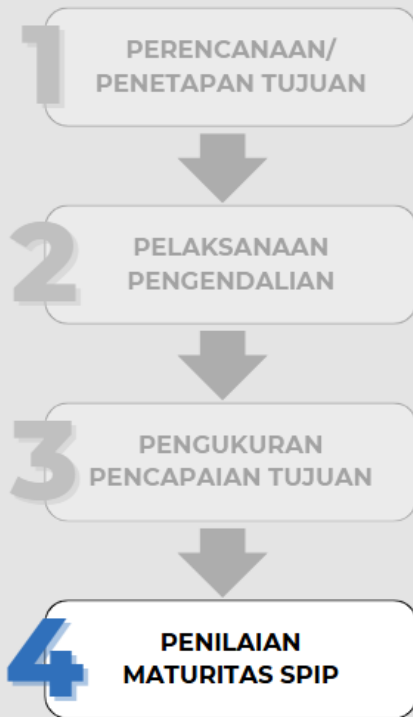
Kriteria Pengukuran Pencapaian Kinerja dapat mengacu pada regulasi & praktik yang ditetapkan, misalnya oleh:

- ✓ Kementerian PPN/Bappenas & Kementerian PANRB untuk **efektivitas & efisiensi kinerja**
- ✓ Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), dan Pengendalian Intern untuk Pelaporan Keuangan (PIPK) untuk **keandalan laporan keuangan & pengamanan aset**
- ✓ Seluruh dokumen hukum sebagai dasar **kepatuhan perundang-undangan**

“Bagaimana organisasi anda
menilai dampak/manfaat
pengendalian intern??”



Proses Bisnis Penyelenggaraan SPIP



Penilaian Maturitas SPIP merupakan **tahapan terakhir** dalam penyelenggaraan SPIP

- Maturitas SPIP adalah **tingkat kematangan SPIP** dalam mencapai tujuan pengendalian
- Fokus SPIP adalah **penyelenggaraan yang optimal dan berkelanjutan**, bukan pada nilai/skor maturitas SPIP
- **Nilai/skor maturitas SPIP** seharusnya adalah **cerminan aktual** dari penyelenggaraan SPIP pada Kementerian/Lembaga/Pemda

Tujuan Penilaian Maturitas SPIP

- ✓ Mengukur efektivitas penerapan SPIP di K/L/D
- ✓ Mengidentifikasi area perbaikan dalam sistem pengendalian
- ✓ Menilai sejauh mana organisasi telah menerapkan manajemen risiko secara efektif
- ✓ Mengintegrasikan manajemen risiko dalam tata kelola & pengendalian intern
- ✓ Menilai efektivitas mekanisme pengendalian dalam mencegah & menangani korupsi
- ✓ Memastikan integritas & transparansi dalam tata kelola organisasi

SPIP

Fokus pada 3 (tiga) komponen:

1. Penilaian atas kualitas **penetapan tujuan** dilakukan untuk memastikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan telah sesuai mandat organisasi, berorientasi pada hasil, dan mempertimbangkan isu strategis.
2. Penilaian atas **struktur dan proses** dilakukan terhadap 5 (lima) unsur pengendalian yang dirinci menjadi 25 (dua puluh lima) sub unsur pengendalian.
3. **Pencapaian tujuan organisasi** dinilai melalui pencapaian 4 (empat) tujuan SPIP yaitu kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

MRI

Fokus pada 3 (tiga) komponen:

1. **Perencanaan:** Penilaian atas komponen perencanaan dilakukan untuk menilai kualitas penetapan tujuan yang meliputi penilaian keselarasan, ketepatan indikator, kelayakan target kinerja sasaran strategis, program, dan kegiatan.
2. **Kapabilitas:** Penilaian atas komponen kapabilitas dilakukan terhadap area-area; (1) Kepemimpinan; (2) Kebijakan Manajemen Risiko; (3) Sumber Daya Manusia; (4) Kemitraan; (5) Proses Pengelolaan Risiko
3. **Hasil:** Komponen hasil menggambarkan hasil pengelolaan risiko dan pencapaian tujuan K/L/D. Penilaian atas komponen hasil terbagi ke dalam dua area yaitu: (1) Aktivitas Penanganan Risiko; (2) Outcome.

IEPK

Fokus pada 3 (tiga) pilar:

1. **Pilar Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi:** karakteristik organisasional yang mengindikasikan 2 (dua) dimensi kapabilitas yaitu kapasitas dan kompetensi organisasi untuk mengelola risiko korupsi.
2. **Pilar Penerapan Strategi Pencegahan:** satu-kesatuan proses yang menyeluruh pada semua aspek penerapan strategi pencegahan korupsi yang berfokus pada: 1) Efektivitas pencegahan dan deteksi dini dan 2) Menilai seberapa jauh budaya organisasi anti korupsi terbentuk
3. **Pilar Penanganan Kejadian Korupsi:** melihat efektivitas pengelolaan risiko korupsi melalui 2 (dua) hal, yaitu sistem respons dan peristiwa korupsi.

Level Maturitas SPIP-T



OPTIMUM (Level 5)

Organisasi telah mampu mendefinisikan **kinerjanya dengan baik** dan **strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi**, dengan struktur dan proses **pengendalian telah efektif** untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi, serta **adaptif terhadap perubahan** lingkungan organisasi.



TERKELOLA DAN TERUKUR (Level 4)

Organisasi telah mampu mendefinisikan **kinerjanya dengan baik** dan **strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi**, struktur dan proses **pengendalian telah efektif** namun **belum adaptif** terhadap perubahan lingkungan organisasi.



TERDEFINISI (Level 3)

Organisasi telah mampu mendefinisikan **kinerjanya dengan baik** dan **strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi**, serta **pengendalian telah dilaksanakan** namun **belum efektif**.



BERKEMBANG (Level 2)

Organisasi telah mampu mendefinisikan **kinerjanya dengan baik** dan **strategi pencapaian kinerjanya masih belum relevan** serta pelaksanaan **pengendalian masih sebatas pemenuhan**.



RINTISAN (Level 1)

Organisasi **belum mampu mendefinisikan kinerjanya**, termasuk **strategi pencapaian kinerja dan pengendaliannya**.

Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 mengatur **mekanisme penilaian** maturitas SPIP dengan pendekatan terintegrasi, yang mencakup:

1. **Penilaian Mandiri** oleh manajemen K/L/D
2. **Penjaminan Kualitas** oleh APIP K/L/D
3. **Evaluasi** oleh BPKP terhadap hasil penilaian mandiri yang telah dijamin kualitas

PM dan PK dapat dilakukan antara rentang waktu **1 Juli tahun sebelumnya s.d 30 Juni tahun berjalan**. Pembagian periode penyelenggaraan yang dilakukan penilaian adalah sebagai berikut:

1. **Penetapan tujuan** dilakukan atas dokumen perencanaan tahun berjalan;
2. **Struktur dan proses** dilakukan atas pengendalian yang dilaksanakan pada tahun berjalan; dan
3. **Pencapaian tujuan** dilakukan atas kinerja tahun sebelumnya.

Evaluasi atas hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP adalah pada bulan Juli sampai dengan Agustus tahun berjalan.



Prinsip Evaluasi oleh BPKP:

- ✓ Evaluasi berfokus pada tindak lanjut perbaikan dari periode sebelumnya
- ✓ Penilaian profesional berbasis observasi, wawancara, dan dokumen pendukung
- ✓ Konsistensi dengan hasil pengawasan BPKP

📌 Tujuannya untuk memastikan hasil penilaian mencerminkan kondisi riil.

1. Mandat dan Konsepsi SPIP
2. Proses Bisnis Penyelenggaraan SPIP
3. **Pembinaan Penyelenggaraan SPIP**

Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

Komitmen BPKP dalam Pembinaan SPIP

- Memastikan SPIP diterapkan secara efektif di seluruh K/L/D
- Mendorong komitmen dan disiplin dalam penyelenggaraan SPIP
- SPIP bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi kebutuhan organisasi

Transformasi Pembinaan SPIP

- Beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis
- Menyempurnakan mekanisme dan prosedur pembinaan
- Menjamin SPIP memberikan manfaat yang konkret dan terukur



Urgensi dan Tantangan ke Depan

- Kompleksitas birokrasi dan pemerintahan semakin meningkat
- SPIP harus semakin adaptif dan responsif
- Efektivitas SPIP di seluruh instansi berdampak pada tata kelola nasional dan target pembangunan

Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

Prinsip-prinsip Pembinaan SPIP

1. KEBERMANFAATAN



- ✓ Fokus pada hasil nyata, bukan sekadar membangun sistem
- ✓ Memastikan pengendalian intern efektif dalam mencapai tujuan organisasi & pembangunan nasional
- ✓ Beralih dari sekadar pemenuhan checklist administratif ke pembenahan sistem SPIP

2. BERKELANJUTAN



- ✓ Pembinaan SPIP harus kontinu dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis
- ✓ Pendekatan jangka panjang dalam membenahi tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian
- ✓ Terintegrasi dengan tugas pengawasan BPKP lainnya (asurans & konsultasi)

3. KONSULTATIF



- ✓ Memberikan arahan dan panduan yang jelas bagi instansi pemerintah
- ✓ BPKP tidak boleh terlibat langsung dalam penyusunan dokumen atau pembangunan sistem pengendalian
- ✓ Menjaga independensi dan mencegah benturan kepentingan

4. KONTEKS SPESIFI



- ✓ Strategi pembinaan disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing instansi
- ✓ Tidak ada pendekatan seragam, tetapi solutif dan berbasis permasalahan unik setiap K/L/D

5. KOMPETENSI DAN PENILAIAN PROFESIONAL



- ✓ Penguatan kompetensi *hard skills* & *soft skills* bagi aparat BPKP dan K/L/D
- ✓ Memastikan pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan yang memadai dalam pembinaan SPIP

Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

BPKP telah menetapkan **tahapan pembinaan SPIP** yang sistematis guna **memastikan setiap langkah** yang diambil dapat **memberikan manfaat optimal** bagi organisasi.

Berikut adalah tahapan pembinaan SPIP yang diterapkan oleh BPKP untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern di seluruh instansi pemerintah.

1. **Penelitian Awal,**
2. **Komunikasi Eksekutif,**
3. **Perencanaan Pembinaan,**
4. **Pelaksanaan Pembinaan,**
5. **Penjaminan Kualitas Pembinaan Spip,**
6. **Pelaporan dan Pemantauan,**
7. **Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas.**

Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

1. Penelitian Awal

Tujuan Penelitian Awal

- ✓ Menentukan target pembinaan SPIP secara spesifik & rasional
- ✓ Memahami kondisi riil kualitas penyelenggaraan SPIP di K/L/D
- ✓ Mengidentifikasi prioritas pembinaan berdasarkan kebutuhan instansi



Langkah-langkah Penelitian Awal

1 Klasterisasi Permasalahan

- Mengidentifikasi tingkat maturitas SPIP berdasarkan hasil evaluasi
- Menganalisis kualitas penyelenggaraan SPIP-T menggunakan 5W1H
- Memanfaatkan data hasil pengawasan, pemeriksaan, & *confirmatory* yang relevan

2 Identifikasi Isu Strategis

- Menentukan area fokus pembinaan yang berdampak besar
- Memprioritaskan isu dengan cakupan luas & pengaruh terhadap pelayanan publik
- Menggunakan pendekatan 5W1H untuk memahami akar masalah

 Hasil penelitian awal akan menjadi dasar perencanaan pembinaan SPIP yang lebih efektif & tepat sasaran

Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

2. Komunikasi Eksekutif

Tujuan Komunikasi Eksekutif

- ✓ Mendapatkan masukan & ekspektasi dari pimpinan K/L/D
- ✓ Membangun komitmen & dukungan terhadap penyelenggaraan SPIP
- ✓ Menyepakati area fokus pembinaan SPIP yang sesuai dengan kebutuhan instansi



Strategi Komunikasi Eksekutif

1 Diskusi & Konsultasi antar Pimpinan

- Melibatkan pimpinan K/L/D, APIP, & pemangku kepentingan terkait
- Menyelaraskan pemahaman tentang urgensi SPIP dalam tata kelola instansi

2 Kesepakatan Area Pembinaan

- Berdasarkan hasil penelitian awal & isu strategis yang teridentifikasi
- Menentukan bentuk pembinaan sesuai kebutuhan

3 Pendekatan Berkelanjutan & Adaptif

- Komunikasi dilakukan secara reguler, intensif, & berbasis data
- Dapat disesuaikan dengan isu strategis terkini

 **Komunikasi eksekutif menjadi dasar dalam membangun sinergi & efektivitas pembinaan SPIP**

Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

3. Perencanaan Pembinaan

Tujuan Perencanaan Pembinaan

- ✓ Menetapkan target pembinaan SPIP yang strategis & berorientasi hasil
- ✓ Mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk efektivitas pembinaan
- ✓ Menyelaraskan pembinaan SPIP dengan program pengawasan lainnya



Langkah-langkah Perencanaan Pembinaan

1 Menetapkan Target Pembinaan

- Berdasarkan hasil penelitian awal & komunikasi eksekutif
- Tidak hanya fokus pada peningkatan skor maturitas, tetapi perbaikan sistemik

2 Mengintegrasikan dengan Pengawasan

- Menyelaraskan dengan Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan (PKP2T)
- Menghubungkan pembinaan SPIP dengan audit, reviu, & evaluasi lainnya

3 Fleksibilitas & Adaptasi

- Memastikan perencanaan tetap responsif terhadap perubahan kebijakan
- Mengakomodasi kebutuhan spesifik K/L/D untuk efektivitas pembinaan

 **Perencanaan yang matang memastikan pembinaan SPIP berjalan terarah & memberikan dampak nyata**

Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

4. Pelaksanaan Pembinaan

Tujuan Pelaksanaan Pembinaan

- ✓ Memastikan pembinaan SPIP berjalan sesuai perencanaan & kebutuhan instansi
- ✓ Meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern di K/L/D
- ✓ Memberikan solusi konkret terhadap permasalahan tata kelola & risiko



Jenis Pembinaan

1 Pembinaan Generik

- Ditujukan untuk kebutuhan dasar penguatan SPIP pada semua instansi
- Fokus pada perencanaan strategis, struktur proses pengendalian, pengelolaan risiko, kepatuhan, pengendalian kecurangan, dan kapabilitas APIP.

2 Pembinaan Kontekstual

- Disesuaikan dengan karakteristik & permasalahan spesifik di tiap instansi
- Menargetkan sektor strategis seperti pengelolaan anggaran, layanan publik, atau reformasi birokrasi

 **Pelaksanaan pembinaan SPIP harus bersifat fleksibel, adaptif, & memberikan dampak nyata**

Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

1 Contoh Pembinaan Generik:

- **Pembinaan pada Perencanaan yang lemah**
 1. Reviu dokumen RPJMN
 2. Pendampingan dan bimbingan teknis penyusunan RPJMD, Renstra, Renja, APBD
- **Pembinaan atas Infrastruktur Pengendalian yang belum terbangun**
 1. Pendampingan penyusunan kebijakan, petunjuk teknis, proses bisnis, SOP
 2. Konsultasi dan bimbingan teknis penggunaan sistem informasi pengendalian
 3. Bimbingan teknis monitoring dan reviu efektivitas pengendalian intern
- **Pembinaan pada Manajemen Risiko yang lemah**
 1. Bimbingan teknis manajemen risiko
 2. Bimbingan teknis penyusunan daftar risiko (risk register) dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP)
- **Pembinaan pada Pengendalian Kecurangan yang lemah**
 1. Pendampingan implementasi FCP, antikorupsi, *early warning system*
 2. Bimbingan teknis pembangunan *whistle blowing system*
- **Pembinaan terhadap Pengawasan APIP yang lemah**
 1. Bimbingan teknis Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR)
 2. Pendampingan penyusunan pedoman pengawasan
 3. Pengawasan kolaboratif (*Joint Audit, Joint Evaluation*)

Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

2 Contoh Pembinaan Kontekstual: Tata Kelola Persampahan di Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan (Sarbagita)

Latar Belakang

- Peningkatan aktivitas pariwisata meningkatkan penumpukan sampah.
- Pembangunan infrastruktur Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) tidak optimal: terdapat TPST tidak beroperasi/berfungsi, TPST melebihi kapasitas, dan adanya pemutusan kontrak TPST.
- Pengurangan sampah dan penanganan sampah sesuai Perpres 97 Tahun 2017 belum optimal berpotensi mencemari lingkungan, menyebabkan gangguan kesehatan, menurunkan daya tarik pariwisata.

(Rencana Agenda) Aktivitas Pembinaan

	Kebijakan dan Kelembagaan	Perencanaan dan Penganggaran	Pelaksanaan	Monitoring dan Evaluasi
<i>“Forum Diskusi Terpumpun dengan pemangku kepentingan terkait untuk penyamaan persepsi.”</i>	1.Perbaikan proses bisnis pengelolaan persampahan dan identifikasi risiko 2.Penguatan koordinasi kelembagaan (memperjelas batasan kewenangan) dan komitmen antar kepala daerah melalui pemerintah provinsi, 3.Replikasi kebijakan penanganan sampah regional, terutama terkait mekanisme pengawasan dan penerapan sanksi, dukungan pengelolaan sampah berbasis masyarakat (<i>reduce, reuse, recycle</i>), dan penerapan retribusi persampahan. 4.Perbaikan SOP pengelolaan Persampahan (pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan, pengolahan, pemrosesan akhir), kebijakan tentang pelaporan data timbulan sampah, serta kebijakan mekanisme pengelolaan retribusi sampah	1.Penyelarasan perencanaan pengelolaan persampahan antar pemda. 2.Pengembangan alternatif pembiayaan pengelolaan persampahan. 3.Kelengkapan studi kelayakan.. 4.Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan. 5.Pengembangan Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) dan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTsa).	1.Peningkatan cakupan pelayanan dan perbaikan sistem pengelolaan persampahan. 2.Skema pengaktifan kembali TPST	1.Perbaikan mekanisme monitoring oleh DLHK dan inspektorat, UPTD pengelolaan persampahan (audit kinerja), pemanfaatan saluran pengaduan masyarakat. 2.Pelaksanaan reviu PSN PSEL (tahapan persiapan proyek).

Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

5. Penjaminan Kualitas Pembinaan SPIP

Tujuan Penjaminan Kualitas

- ✓ Memastikan pembinaan SPIP berjalan sesuai arah & tujuan yang ditetapkan
- ✓ Menilai efektivitas metode & strategi pembinaan yang diterapkan
- ✓ Memberikan masukan untuk peningkatan berkelanjutan dalam proses pembinaan



Langkah-langkah Penjaminan Kualitas

1 Pemantauan & Evaluasi

- Menilai efektivitas pembinaan melalui observasi & diskusi dengan instansi
- Mengidentifikasi kendala dalam implementasi & memberikan solusi

2 Klarifikasi & Konfirmasi

- Jika diperlukan, dilakukan klarifikasi dengan instansi terkait
- Memastikan setiap rekomendasi pembinaan telah dipahami & diterapkan

3 Konsolidasi & Peningkatan Kualitas

- Melibatkan unit koordinasi & pihak terkait dalam perbaikan metode pembinaan
- Memastikan hasil pembinaan memberikan dampak nyata pada tata kelola instansi

 **Penjaminan Kualitas Pembinaan akan meningkatkan Efektivitas & keberlanjutan penguatan pengendalian intern**

Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

6. Pelaporan dan Pemantauan

Tujuan Pelaporan dan Pemantauan

- ✓ Memastikan hasil pembinaan SPIP terdokumentasi dengan baik
- ✓ Menilai perkembangan implementasi & efektivitas pembinaan di K/L/D
- ✓ Mengidentifikasi kendala & tindak lanjut untuk perbaikan berkelanjutan



Langkah-langkah Pelaporan dan Pemantauan

1 Penyusunan Laporan Hasil Pembinaan

- Melaporkan objek, ruang lingkup, dan hasil pembinaan secara berkala
- Menguraikan isu strategis, kendala, serta rekomendasi perbaikan

2 Pemantauan Tindak Lanjut

- Mengawasi implementasi rekomendasi perbaikan yang telah diberikan
- Mengidentifikasi hambatan dalam penerapan penguatan SPIP di instansi

3 Konsolidasi & Analisis Hasil Pembinaan

- Mengintegrasikan laporan dari berbagai instansi untuk analisis strategis
- Menggunakan data pelaporan untuk peningkatan kebijakan & strategi pembinaan

 **Pelaporan dan pemantauan memastikan pembinaan SPIP berjalan efektif, berkelanjutan, & berdampak nyata**

Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

7. Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas

Tujuan Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas

- ✓ Memastikan aparat K/L/D memiliki keterampilan dalam penyelenggaraan SPIP
- ✓ Meningkatkan efektivitas pembinaan melalui penguatan kompetensi SDM
- ✓ Mewujudkan budaya pengendalian intern yang kuat & berkelanjutan



Strategi Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas

1 Pelatihan & Workshop

- Meningkatkan pemahaman konsep SPIP, manajemen risiko, & pengendalian kecurangan
- Fokus pada penguatan *hard skills* & *soft skills* dalam implementasi pengendalian intern

2 Bimtek & Pendampingan

- Memberikan panduan spesifik sesuai kebutuhan K/L/D
- Meningkatkan kemampuan dalam penilaian maturitas SPIP & penerapan kebijakan pengendalian

3 Knowledge Sharing & Benchmarking

- Mendorong pertukaran pengalaman & praktik terbaik antarinstansi
- Mengadaptasi pendekatan & inovasi dalam pembinaan SPIP

 **Peningkatan kompetensi SDM adalah kunci keberhasilan penyelenggaraan SPIP yang efektif**

“Apa harapan & tantangan kegiatan pembinaan SPIP oleh BPKP?”





Terima Kasih

